

RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan



**Rakor Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pendidikan
GS Nilam Sari-Tanjung Balai Karimun, 16 Februari 2015**

Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Dasar Hukum Penyusunan RPJMN 2015-2019
- Dokumen RPJMN 2015-2019
- Struktur RPJMN 2015-2019
- Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti
- Strategi Pembangunan
- Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar



Siklus Manajemen Pembangunan





RPJMN 2015-2019

Sumber: Perpres 5/2015



Dasar Hukum

Penyusunan RPJMN 2015-2019

1. UU 25/2004 tentang SPPN:

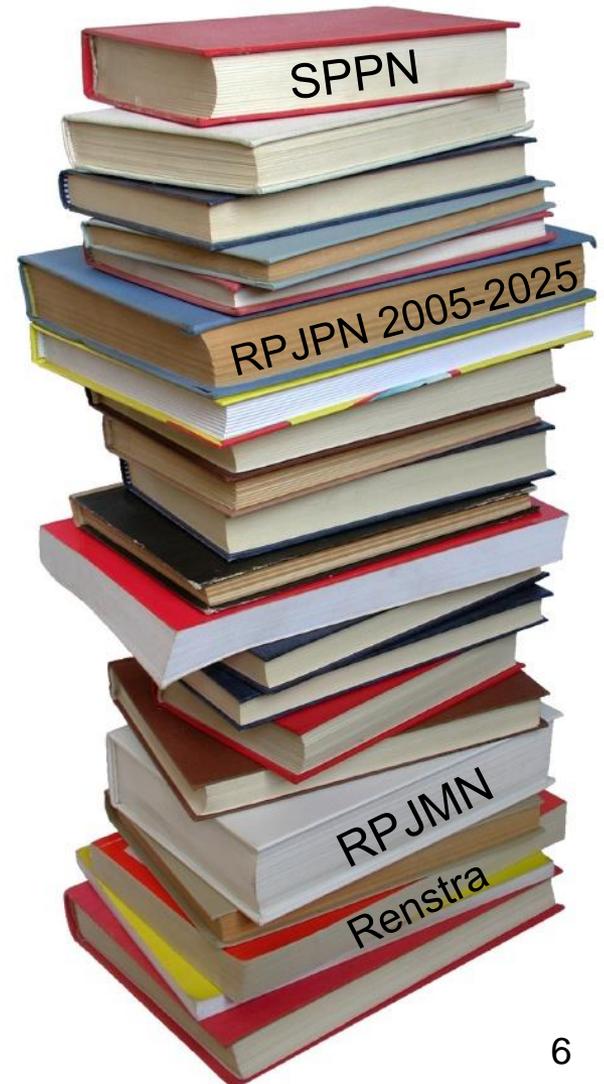
Pasal 19 ayat 1:

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik.

2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025

Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019):

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.



Dokumen RPJMN 2015-2019



BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum
3. Lingkungan Strategis
4. Kerangka Ekonomi Makro
5. Kebijakan Pembangunan Nasional
6. Agenda Pembangunan Nasional
7. Kaidah Pelaksanaan

BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
2. Pembangunan SOSBUD dan Kehidupan Beragama
3. Ekonomi
4. Bidang IPTEK
5. Bidang Politik
6. Bidang HANKAM
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Penyediaan SARPRAS
10. Bidang Pengelolaan SDA dan LH

BUKU III: AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Wilayah Nasional
2. Wilayah Papua
3. Wilayah Maluku
4. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
5. Wilayah Pulau Sulawesi
6. Wilayah Pulau Kalimantan
7. Wilayah Pulau Jawa -Bali
8. Wilayah Pulau Sumatera

Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan **kualitas hidup manusia Indonesia** yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA - 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup **Manusia dan Masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Trisakti

I. Berdaulat dalam Bidang Politik

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Trisakti

II. Berdikari dalam Bidang Ekonomi

1. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.

Trisakti

11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

III. Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan

1. **Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.**
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
---	--	--	--	----------------------	--	--

NAWACITA – 9 Agenda Prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
--	---	---	---	--	--	--	---	---

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 Program Aksi-115 Prioritas Utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi)

<ol style="list-style-type: none"> Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) 	<ol style="list-style-type: none"> Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun ekonomi maritim Penguatan sektor kehutanan Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 	<ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 	<ol style="list-style-type: none"> Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga
---	--	---	--	---	--	--	--	--

Strategi Pembangunan

NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk **manusia dan masyarakat**;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

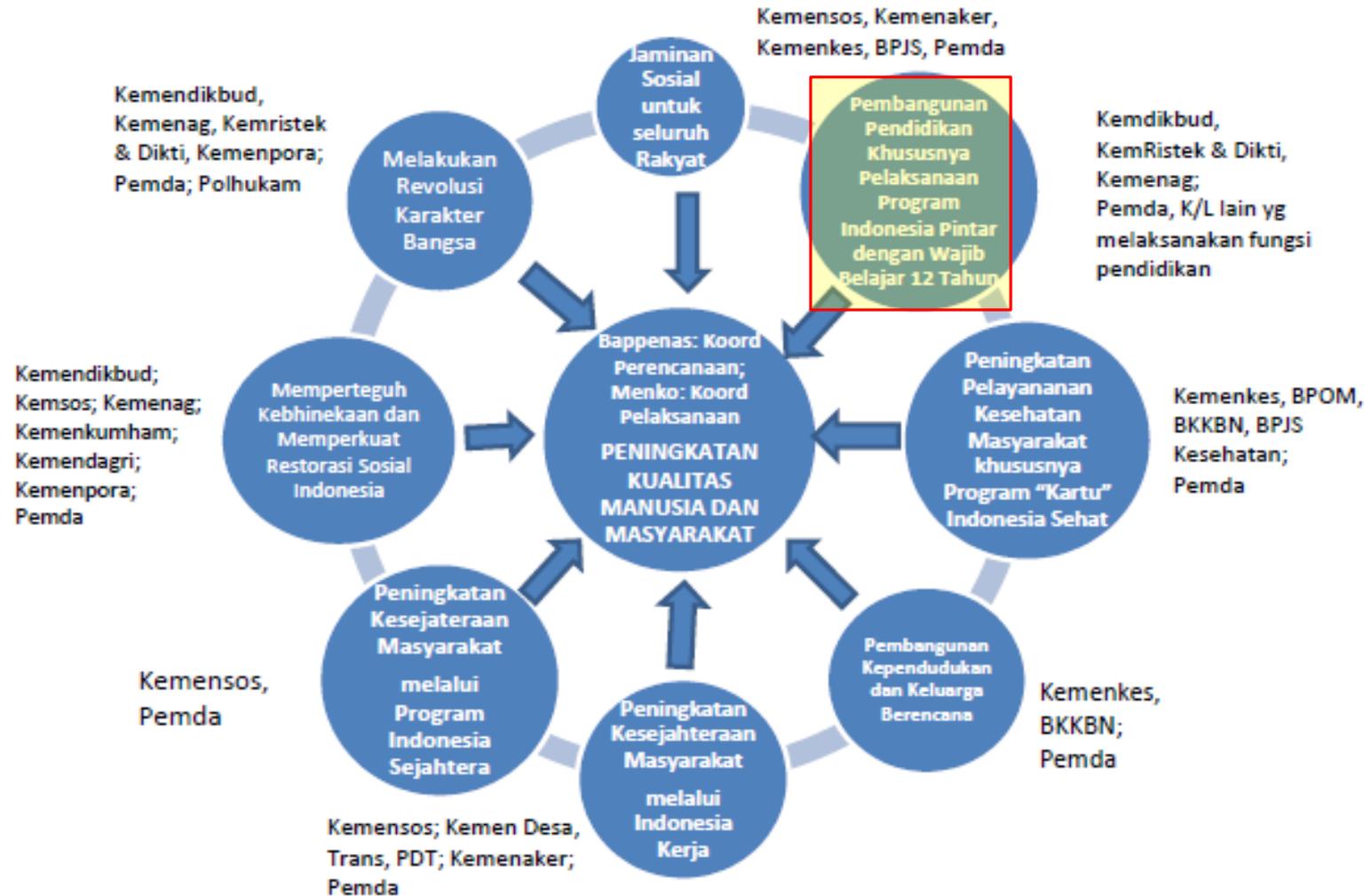
Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Pembangunan Manusia dan Masyarakat



Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar



Sasaran Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yaitu:

	Jenjang/Komponen	Satuan	Status Awal 2014	Target 2019
I	Pendidikan Dasar			
A.	SD/MI/SDLB/Paket A			
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
B.	SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II	Pendidikan Menengah			
	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5
	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,2	91,6
III	Pendidikan Anak Usia Dini			
	Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2
IV	Pendidikan Tinggi			
	Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,5	36,7

Sasaran Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun

2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;

Sasaran Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun

6. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
8. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
9. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
10. Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan

- Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
- Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas.
- Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN.

Strategi

1.	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
2.	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas
3.	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
4.	Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan
5.	Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya
6.	Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
7.	Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
8.	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
9.	Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
10.	Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
11.	Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun

- dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
- untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui:
 - a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b. Penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun

- dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
- untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui:
 - c. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - d. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.
 - e. Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun

- dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas**
- untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik**
- untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja:**
 - a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;

- c. Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
- d. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.
- f. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
- g. Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.
- h. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru.

- i. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah ; dan
- j. Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
- k. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
- l. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
- m. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
- n. Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

- melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja, dan
- mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.



4. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui:



- a. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
- b. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
- c. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

5. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:

- a. Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
- b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
- c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
- d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
- f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;

5. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:

- g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
- h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
- i. Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
- j. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti
 - perilaku hidup bersih dan sehat,
 - kepedulian terhadap lingkungan,
 - kesehatan reproduksi,
 - pengetahuan gizi seimbang, dan
 - pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.

6. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:

- a. Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
- b. Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
- c. Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
- d. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
- e. Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
- f. Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; serta
- g. Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

7. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui:

- a. Pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
- b. Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
- c. Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
- d. Penguatan kerjasama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
- e. Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.

8. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui:

- a. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
- b. Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
- c. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.



9. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, melalui strategi:



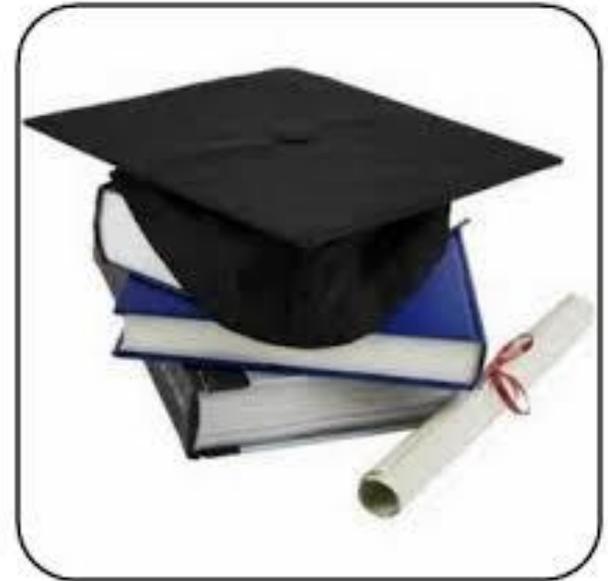
- a. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
- b. Peningkatan infrastruktur iptek di perguruan tinggi;
- c. Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di Luar Jawa.

10. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi:

- a. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- b. Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
- c. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

11. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, melalui strategi:

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan tidak menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.
- b. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah-universitas-industri.



A photograph of a lighthouse building with a red roof and a white tower with a blue and red top, situated on a rocky pier over the ocean. The text "Terima Kasih" is overlaid in the center.

Terima Kasih